**BAB I**

**PENDAHULUAN**

* 1. **Latar Belakang.**

Peran pemerintah merupakan hal yang penting dalam proses pelaksanaan kebijakan yang digulirkan terutama dalam hal pemberdayaan masyarakat, karena masih begitu banyak ditemukan kurangnya perhatian pemerintah dan .ketidaktahuan masyarakat akan potensi besar yang dimiliki dirinya maupun lingkunganya, sehingga dalam melaksanakan perannya salah satu cara yang dilakukan adalah dengan melakukan pemberdayaan.

Permasalahan publik yang dipengaruhi oleh kurangnya peran pemerintah dalam hal pemberdayaan sumber daya manusia maupun lingkunganya sering terjadi diberbagai kota di Indonesia, salah satu kota yang mengalaminya adalah Kota Bandung yang merupakan ibukota dari Provinsi Jawa Barat. Pemerintahan Daerah memiliki hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan Gubernur, Bupati Atau Walikota adalah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. Pemerintah kota Bandung dipimpin seorang Kepala Daerah yaitu Walikota sehingga terdapat peraturan daerah atau kebijakan khusus yang dikeluarkan untuk kota Bandung itu sendiri.

 Terkait dengan peran pemerintah yang dilakukan dalam hal pemberdayaan guna penanganan masalah publik yang terjadi, salah satu fenomena yang berkembang pada saat ini adalah tentang UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah). Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria sedangkan usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha mengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria dan usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang beradiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memainkan peran yang sangat vital di dalam pertumbuhan pembangunan ekonomi karena UMKM dapat menyerap paling banyak tenaga kerja dibandingkan usaha besar (UB). Di Indonesia Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) merupakan salah satu penyumbang terbesar perekonomian, selain itu UMKM di Indonesia sering dikaitkan dengan masalah-masalah ekonomi dan sosial dalam negeri seperti tingginya tingkat kemiskinan, besarnya jumlah pengangguran, ketimpangan distribusi pendapatan, proses pembangunan yang tidak merata antara daerah perkotaan dan perdesaan, serta masalah urbanisasi. Perkembangan UMKM diharapkan dapat memberikan kontribusi positif yang signifikan terhadap upaya-upaya penanggulangan masalah-masalah tersebut.

Tabel 1.1

Perkembangan Jumlah Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM)

 di Indonesia Tahun 2009-2013

|  |  |
| --- | --- |
| **Tahun** | **Jumlah UMKM** |
| 2009 | 52.764.603 |
| 2010 | 53.823.732 |
| 2011 | 55.206.444 |
| 20122013 | 56.534.59257.895.721 |

*Sumber: bps.go.id*

Dari Tabel 1.1 di atas dapat dilihat bahwa setiap tahunnya jumlah UMKM mengalami peningkatan. Pada tahun 2009 jumlah UMKM di Indonesia berjumlah 52.764.603 unit usaha dan pada tahun 2013 jumlah UMKM meningkat menjadi 57.895.721 unit usaha. Berikut adalah beberapa keunggulan UMKM di Indonesia:

1. Inovasi dalam teknologi yang telah dengan mudah terjadi dalam pengembangan produk.
2. Hubungan kemanusiaan yang akrab di dalam perusahaan kecil.
3. Kemampuan menciptakan kesempatan kerja cukup banyak atau penyerapannya terhadap tenaga kerja.
4. Fleksibilitas dan kemampuan menyesuaikan diri terhadap kondisi pasar yang berubah dengan cepat dibanding dengan perusahaan skala besar yang pada umumnya birokratis.
5. Terdapatnya dinamisme managerial dan peranan kewirausahaan.

Saat ini UMKM banyak tersebar di berbagai provinsi di Indonesia tidak terkecuali pada provinsi Jawa Barat. Berikut adalah perkembangan UMKM dan Usaha Besar di Jawa Barat periode tahun 2009-2013 :

Tabel 1.2

Perkembangan Jumlah Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM)

dan Usaha Besar (UB) di Jawa Barat Tahun 2009-2013

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tahun** | **Usaha Mikro** | **Usaha Kecil** | **Usaha Menengah** | **Usaha Besar** |
| 2009 | 8.410.246 | 106.752 | 7.496 | 1.536 |
| 2010 | 8.616.254 | 106.592 | 7.408 | 1.566 |
| 2011 | 8.626.671 | 116.062 | 8.181 | 3.728 |
| 2012 | 9.042.519 | 115.749 | 8.235 | 1.853 |
| 2013 | 9.218.276 | 116.036 | 8.417 | 1.908 |

*Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Jawa Barat*

Berdasarkan Tabel 1.2, dapat dilihat bahwa jumlah UMKM di Jawa Barat terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun yakni dari tahun 2009-2013 sedangkan jumlah UB cenderung berfluktuatif. Pada tahun 2009, jumlah UMKM sebanyak 8.524.494 unit sedangkan usaha besar hanya 1.536 unit dan sampai pada tahun 2013 jumlah UMKM sebanyak 9.342.729 unit sedangkan usaha besar hanya mencapai 1.908 unit. Hal ini menandakan bahwa dalam pembangunan ekonomi di Indonesia UMKM selalu digambarkan sebagai sektor yang mempunyai peranan yang penting, karena sebagian besar jumlah penduduknya berpendidikan rendah dan hidup dalam kegiatan usaha kecil baik di sektor tradisional maupun modern.

 Sebagai ibu kota Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung memiliki kontribusi cukup besar pada pembentukan ekonomi Provinsi Jawa Barat salah satunya dari sektor UMKM dan industri kreatif. Perkembangan industri kreatif di Kota Bandung menunjukkan peningkatan yang cukup memuaskan. Sejauh ini, terdapat kawasan produksi strategis berdasarkan RT/RW Kota Bandung, diantaranya adalah 33 Sentra industri kreatif dengan tujuh sentra kawasan industri utama yang meliputi Sentra Sepatu dan Olahan Kulit Cibaduyut, Sentra Boneka Sukamulya, Sentra Rajutan Binong Jati, Sentra Tekstil Cigondewah, Sentra Kaos Surapati, Sentra Jeans Cihampelas, serta Sentra Tahu dan Tempe Cibuntu.

Tabel 1.3

Pertumbuhan Jumlah Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM)

 di Kota Bandung Tahun 2009-2013

|  |  |
| --- | --- |
| **Tahun** | **Jumlah UMKM** |
| 2009 | 1.409 |
| 2010 | 1.510 |
| 2011 | 1.783 |
| 20122013 | 1.8892.104 |

*Sumber: Dinas Koperasi dan UKM*

*Peridag Kota Bandung (data diolah)*

Berdasarkan Tabel 1.3, dapat dilihat bahwa jumlah UMKM di Kota Bandungpun terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun yakni dari tahun 2009-2013. Pada tahun 2009, jumlah UMKM sebanyak 1.409 unit dan sampai pada tahun 2013 jumlah UMKM sebanyak 2.104 unit. UMKM di Kota Bandung mengalami pertumbuhan setiap tahunnya karena hal ini di dorong oleh pertumbuhan ekonomi di Kota Bandung yang cukup baik. Menurut Deden Y. Hidayat, Ketua KADIN Kota Bandung bahwa “pertumbuhan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di kota Bandung mengalami pertumbuhan didorong oleh besarnya serapan produk oleh masyarakat, terutama wisatawan”.

Sentra-sentra di Kota Bandung dapat dijadikan tujuan wisata bagi wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara, namun belum optimal karena terkendala oleh ketidaklengkapan infrastruktur sehingga belum dilengkapi oleh akses jalan yang memadai, minimnya promosi produk sentra, kurangnya bantuan permodalan baik berupa materi maupun peralatan yang menunjang produksi serta kurangnya pemberdayaan yang dilakukan terhadap sentra tersebut. Salah satu sentra Industri yang menjadikan Bandung sebagai kota kreatif adalah industri yang bergerak di bidang fesyen yaitu sentra industri rajut Binong Jati.

Sentra industri rajut Binong Jati merupakan salah satu industri kecil rumahan (*home industry)* yang potensial dan dapat memberikan kontribusi pada perekonomian Kota Bandung. Pakaian rajutan yang dihasilkan industri tersebut mampu bersaing dengan rajutan yang diproduksi pabrik-pabrik besar. Selain harganya yang relatif murah, model pakaiannya mengikuti selera konsumen, corak pakaian rajutannya bervariatif sehingga konsumen menjadi tertarik, hal ini tidak terlepas dari kreativitas para pengrajinnya hasil produksi rajutan Binong Jati yang semakin dikenal dan disukai oleh masyarakat.

Namun saat ini, sentra industri rajut Binong Jati memiliki hambatan dan permasalahan yang dialami oleh para pengusahanya. Sehingga banyak pengusaha rajut binong menutup usahanya karena tidak dapat mengatasi hambatan dan permasalahan yang terjadi. Berdasarkan survey awal yang telah dilakukan, semenjak tahun 2009-2013 banyak para pengusaha yang gulung tikar. Sementara tidak sedikit di antara para pelaku usaha itu yang hanya mengandalkan modalnya pada pinjaman kredit dari bank. Semula sekitar 400 industri rumahan kain rajut Binong Jati secara konsisten mampu memenuhi permintaan sampai 10.000 lusin pakaian rajut per hari. Namun kini permintaan yang ada hanya sekitar 3.000 lusin per hari. Hal ini mengakibatkan pendapatan dan omset penjualan yang semakin berkurang serta banyaknya pengusaha yang tidak mampu bersaing dengan pengusaha lain dan produk impor, sehingga terjadinya penurunan pengusaha dan tenaga kerja pada sentra industri rajut Binong Jati di Kota Bandung.

Tabel 1.4

Jumlah Pengusaha Rajut Sentra Industri Binong Jati

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Tahun** | **Jumlah Pengusaha Rajut Binong Jati** | **Pertumbuhan (%)** |
| 1 | 2009 | 365 | - |
| 2 | 2010 | 300 | -17.8 |
| 3 | 2011 | 293 | -2.33 |
| 4 | 2012 | 278 | -5.12 |
| 5 | 2013 | 240 | -13.67 |

 Sumber : *Koperasi Industri Rajut Binongjati (KIRBI)*

Berdasarkan data di atas, jumlah pengusaha di Industri Rajut Binong Jati mengalami penurunan semenjak tahun 2010. Hal ini disebabkan oleh mulai adanya Pasar global (AFTA) yaitu masuknya barang-barang impor cina yang murah dan inovatif yang membanjiri pasar lokal. Selain itu, terdapat beberapa permasalahan utama yang berkaitan dengan masalah klasik atau kelemahan yang sering ditemukan pada Sentra Industri Rajut Binong Jati pada saat pra penelitian yaitu sebagai berikut :

1. Kurangnya pengetahuan dalam mencari modal luar selain perbankan.
2. Konsep usaha yang kurang berkembang.
3. Pemasaran masih berada dalam lingkup lokal.
4. Teknologi produksi yang digunakan tidak berkembang.
5. Sumber daya manusia yang kurang memiliki jiwa kewirausahaan.
6. Perijinan/ legalitas yang sulit.
7. Info pasar yang minim.

Banyaknya pengusaha yang tutup atau gulung tikar disebabkan omset dan pendapatan mereka yang terus menurun. Mereka tidak mampu lagi menanggung biaya operasional baik untuk bahan baku dan pembayaran tenaga kerja sehingga para pengusaha rajut Binong Jati yang tidak dapat bertahan lebih memilih menutup usahanya.

Tabel 1.5

Perkembangan Pendapatan Pengusaha Rajut

Di Sentra Industri Rajut Binong Jati

Periode Juli-Desember 2013

(Ribuan Rupiah)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Bulan** | **Rata-Rata Pendapatan** | **Presentase (%)** |
| Juli | 95.000 | - |
| Agustus | 63.200 | -33.47 |
| September | 58.750 | -7.04 |
| Oktober | 52.650 | -10.38 |
| November | 52.050 | -1.14 |
| Desember | 60.100 | 15.47 |

*Sumber: Data hasil pra penelitian, diolah*

Seperti pada Tabel 1.4, perkembangan pendapatan pengusaha rajut Binong Jati mengalami penurunan yang cukup signifikan. Kenaikan dan penurunan pendapatan memang hal yang biasa dalam suatu usaha namun pendapatan pengusaha rajut Binong Jati periode Juli-Desember 2013 cenderung lebih besar mengalami penurunan daripada kenaikannya. Penurunan terbesar terjadi pada bulan Agustus 2013 sebesar 33.47%. Adanya penurunan pendapatan, menunjukkan bahwa perkembangan usaha sedang tidak baik. Jika penurunan pendapatan terus saja dibiarkan maka akan menimbulkan kelesuan pada usahanya karena tidak berkembang dan akhirnya berdampak pada kesejahteraan masyarakat atau pengusaha itu. Kesejahteraan masyarakat yang menurun akan menyebabkan banyak pengusaha yang tutup dan beralih profesi dan jika itu terjadi sentra industri Rajut Binong Jati akan kekurangan pengusaha, tenaga kerja dan kontribusinya terhadap Penghasilan Asli Daerah kota Bandung akan menurun.

Peran pemerintah yang dilakukan oleh Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung dalam hal pemberdayaan untuk meningkatkan potensi Sentra Rajut Binong Jati adalah melaksanakan pelatihan terhadap pelaku UKM secara berkala, promosi gelar kemitraan, pemberian akses, menciptakan iklim yang positif dalam kewirausahan, memberikan permodalan atau bantuan mengenai infrastruktur sentra. Tetapi dalam melaksanakan perannya pemerintah masih belum berjalan secara efektif karena terkendala oleh pembiayaan atau dana anggaran terbatas dan sulitnya membuka mindset dalam pelaku usaha. Hal ini dapat berdampak pada pemberdayaan sentra tersebut seperti pengusaha yang gulung tikar bahkan mengalami pailit karena sudah tidak seimbang antara *supply* dan *demand* atau penawaran dan permintaan, kurangnya pengetahuan dalam mencari modal luar selain perbankan, konsep usaha yang kurang berkembang dan sumber daya manusia yang kurang memiliki jiwa kewirausahaan, sehingga sampai saat ini Sentra Rajut Binong Jati belum bisa berkembang secara signifikan.

Salah satu yang patut menjadi sorotan adalah mulai adanya pasar global (AFTA) dan masyarakat ekonomi asean (MEA) yaitu masuknya barang-barang impor cina yang murah dan inovatif yang membanjiri pasar lokal dan persaingan tenaga kerja secara asia tenggara. Persaingan yang terjadi antar pengusaha maupun dengan produk impor Cina membuat pengusaha rajut harus lebih gesit dan pandai dalam meningkatkan penjualannya. Selain itu dalam menghadapi persaingan masyarakat ekonomi asean (MEA) sumberdaya manusia atau para pengrajin rajut harus dibekali banyak keterampilan, karena tenaga kerja dari luar negeri akan ikut bersaing memasuki lapangan kerja domestik sehingga keterampilan yang harus dimiliki bukan hanya dalam hal merajut tetapi dalam hal berkomunikasi menggunakan bahasa asing seperti bahasa inggris pun patut dikuasai oleh pengrajin.

Pelaku usaha maupun pengrajin harus meningkatkan penjualan dengan membuat produk yang berbeda dengan pesaing lainnya khususnya pesaing dari produk luar ataupun hasil yang dibuat oleh pengrajin asing. Pengusaha rajut Binong Jati dituntut untuk berpikir kreatif dan inovatif dalam hal pembuatan produk agar tidak kalah saing oleh hasil produk asing, sehingga dalam hal segi harga jual pun dapat bersaing dan setara dengan produk asing. Disinilah peran pemerintah khususnya dalam hal pemberdayaan terhadap Sentra Rajut Binong Jati sangat dibutuhkan, karena peran-peran yang dilakukan oleh pemerintah dapat meningkatkan kualitas dan pengetahuan pelaku usaha maupun pengrajin rajut sehingga memiliki bekal yang cukup dalam menghadapi pasar global (AFTA) dan masyarakat ekonomi asean (MEA).

Berdasarkan dari berbagai fenomena yang disebutkan di atas, yang perlu di perhatikan dalam rangka meningkatkan potensi UMKM di Kota Bandung khususnya di sentra rajut Binong Jati adalah proaktifnya peran pemerintah khususnya Kota Bandung yang salah satunya dalam hal pemberdayaan, karena upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan masyarkat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap UMKM diharapkan mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Peran pemerintah pada dasarnya merupaka langkah yang menunjang atas regulasi yang ditetapkan pemerintah agar sesuai dengan yang diharapkan. Terkait dengan permasalahan yang telah dipaparkan di atas, peneliti kemudian merasa tertarik untuk mengkaji dan membahas lebih lanjut tentang permasalahan tersebut serta menuangkannya dalam bentuk skripsi yang berjudul **“PERAN PEMERINTAH DALAM PEMBERDAYAAN SENTRA RAJUT BINONG JATI DI KOTA BANDUNG”.**

 **1.2 Perumusan Masalah.**

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka peneliti merumuskan permasalahan yaitu : *Bagaimanakah Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Sentra Rajut Binong Jati Di Kota Bandung?*

**1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian.**

**1.3.1 Tujuan Penelitian.**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah peran pemerintah dalam pemberdayaan sentra rajut Binong Jati di Kota Bandung.

**1.3.2 Manfaat Penelitian.**

 Manfaat penelitian ini antara lain :

1. Manfaat Akademis.

Secara akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengalaman serta memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Ilmu Administrasi Negara, khususnya mengenai peran pemerintah dalam pemberdayaan sentra rajut Binong Jati di Kota Bandung.

1. Manfaat Praktis.

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menjadi bahan alternatif pemikiran atau pertimbangan bagi para pengambil keputusan *(decisionmaker)* terutama dalam memecahkan masalah serupa dan dapat menjadi bahan referensi bagi penelitian akademis sejenis di masa mendatang.

**1.4 Lokasi & Lamanya Penelitian.**

**1.4.1 Lokasi Penelitian.**

 Lokasi penelitian di Kota Bandung, Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian Perdagangan dan Sentra Rajut Binong Jati.

**1.4.2 Lamanya Penelitian.**

Lamanya penelitian yang akan dilakukan terhitung dari tanggal 19 November 2014 sampai dengan 18 Desember 2014